

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru menyebabkan sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan dipemerintah.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan pemerintah daerah di Indonesia adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dan penyimpangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) dan pemerintah daerah (PEMDA) yang menjurus ke tindakan korupsi.

Menurut [1] menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat dilakukan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Menurut [2] kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Sedangkan menurut [3] Laporan keuangan adalah wadah bagi sebuah perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada umum.

Perusahaan harus mampu menyediakan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang bermutu. Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan yang baik adalah sistem informasi akuntansi dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input, proses dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah sistematis dan terstruktur sebagai dasar dari sistem pelaporan keuangan yang tertata baik [3]. Akuntan Indonesia (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya pada penelitian [4] yaitu mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas standar akuntansi pemerintah (SAP). Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah Pengaruh efektivitas standar akuntansi pemerintah (SAP), kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintah Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* [1]. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Standar Akuntansi harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan suatu standar yang digunakan pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penelitian mengenai hubungan antara efektivitas standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan kualitas laporan keuangan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Salah satunya penelitian [5] adalah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan penelitian ini mengatakan bahwa Standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah Pengaruh efektivitas Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi sdm, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan.

Menurut [6] bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah karakteristik pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk melakukan suatu tugas atau melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut [7] kompetensi Sumber Daya Manusia adalah keahlian seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu

cara yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut [8] Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Seseorang atau individu yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan.

Penelitian mengenai hubungan antara kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas laporan keuangan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Salah satunya penelitian [9] adalah pengaruh pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah Pengaruh efektivitas standar akuntansi pemerintah (SAP), kompetensi sdm dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu cara yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisien, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan [7]. Menurut [10] Sistem Pengendalian Intern merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, menyediakan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut [11] Sistem Pengendalian internal adalah integrasi dari kegiatan, rencana, sikap, kebijakan, dan upaya orang-orang dari suatu organisasi yang bekerja sama untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa organisasi akan mencapai tujuan dan misinya. Proses pengendalian intern yang baik dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi organisasi akan menimbulkan semangat organisasi untuk terus melakukan upaya dalam menjaga kualitas laporan keuangan organisasi.

Penelitian mengenai hubungan antara Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan kualitas laporan keuangan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Salah satunya penelitian [12] adalah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan [12] menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penilitan sekarang adalah Pengaruh efektivitas akuntansi pemerintah (SAP), kompetensi sdm dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengkaji dan membahas beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Belum mampu menyediakan laporan keuangan yang mengandung informasi yang bermutu.
2. Banyaknya terjadi manipulasi data pada laporan keuangan.
3. Terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi.
4. Pembuatan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu.

1.3 Batasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini di batasi pada Pengaruh efektivitas standar pemerintah (SAP), kompetensi SDM, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pembuat Kebijakan/Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah atau swasta dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Manfaat bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota padang

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa faktor yang memengaruhi kinerja karyawan badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Manfaat bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan menambah variabel maupun jumlah sampel yang diteliti agar penelitian selanjutnya menjadi lebih akurat.